

Nama : Malik Sunanda

NPM : 2213053196

Kelas : 2B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Jawaban : Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yakni ternyata tidak sedikit masyarakat umum selain mahasiswa yang ikut serta turut aktif dalam mengkritik adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menciptakan serta menetapkan peraturan perundang-undangan.

Hal yang perlu dibenahi yaitu membentuk serta menjadikan sistem pemerintahan pada negara menjadi sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, karena dengan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah dan meminimalkan potensi korupsi, dan meminimalisir pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang telah diberikan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Jawaban : Konstitusi adalah hukum dasar yang tertulis dalam satu naskah yang bersifat politis, sosiologis, bahkan bersifat yuridis dan menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Hakikat dari konstitusi adalah menjadi dasar hukum yang jelas dan mengatur hak dan kewajiban bagi semua warga negara, serta menetapkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan.

Konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, konstitusi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak-hak asasi manusia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban : Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu melanggar hak asasi manusia seperti melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, melakukan korupsi, nepotisme, atau kolusi dalam pemerintahan, menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi seperti memutuskan kasus tanpa prosedur hukum yang benar.

Para pejabat yang telah melakukan pelanggaran seperti di atas tetap akan mendapat hukuman karena hukum bersifat adil tidak pandang bulu baik dia pejabat atau bukan. Namun keputusan mengenai hukuman yang diberikan kepada pejabat negara yang melakukan tindakan tidak konstitusional haruslah ditentukan melalui proses yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.